

BAB 1

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Masalah

Secara umum tujuan dibentuknya suatu koperasi adalah untuk memberikan kesejahteraan dan manfaat bagi para anggotanya. Agar tujuan tersebut dapat tercapai maka setiap koperasi harus menjalankan suatu usaha yang kemudian akan menghasilkan keuntungan dari hasil usahanya. Untuk menghasilkan keuntungan, suatu koperasi harus memiliki produk yang dapat dijual kepada masyarakat. Produk-produk tersebut dapat berupa produk non-fisik, bahan mentah, maupun barang jadi yang siap dikonsumsi (Rudianto,2006:11).

Koperasi sebagai suatu lembaga di mana orang-orang yang memiliki kepentingan relatif homogen, berhimpun untuk meningkatkan kesejahteraannya. Dalam pelaksanaan kegiatannya, koperasi dilandasi oleh nilai-nilai dan prinsip-prinsip yang mencirikannya sebagai lembaga ekonomi yang sarat dengan nilai etika bisnis. Nilai-nilai yang terkandung dalam koperasi, seperti menolong diri sendiri (self help), percaya pada diri sendiri (selfreliance), dan kebersamaan (cooperation) akan melahirkan efek sinergis. Efek ini akan menjadi suatu kekuatan yang sangat ampuh bagi koperasi untuk mampu bersaing dengan para pelaku ekonomi lainnya. Konsep yang demikian mendudukan koperasi sebagai badan usaha yang cukup strategis bagi anggotanya dalam mencapai tujuan-tujuan ekonomis yang pada gilirannya berdampak pada masyarakat secara luas.

Menurut Hendar, Kusnadi (2007:12) Koperasi dijadikan sebagai guru perekonomian nasional karena:

1. Koperasi mendidik sikap self-helping.
2. Koperasi mempunyai sifat kemasyarakatan, yang didalamnya kepentingan masyarakat harus lebih diutamakan dari pada kepentingan diri atau golongan sendiri.
3. Koperasi digali dan dikembangkan dari budaya asli bangsa Indonesia.
4. Koperasi menentang segala paham yang berbau individualisme dan kapitalisme.

Pada kenyataannya, koperasi sampai saat ini masih menduduki posisi pinggir dalam perekonomian nasional. Hal ini disebabkan karena peran koperasi hanya terbatas pada bisnis yang berskala kecil dan lokal. Dengan adanya keterbatasan-keterbatasan yang dimiliki koperasi akan memberikan peluang perbaikan yang begitu luas. Perbaikan ini diarahkan untuk mengembangkan koperasi menjadi lebih maju, lebih mandiri, dan lebih berakar dalam masyarakat, serta menjadi badan usaha yang sehat dan mampu berperan dalam semua bidang usaha. Salah satu perbaikan yang dilakukan adalah dalam bidang manajerial untuk menciptakan koperasi sebagai badan usaha yang efisien, efektif dan ekonomis atas keterbatasan sumber daya yang dimilikinya.

Akuntansi dapat berperan untuk memberikan perbaikan dalam bidang manajerial. Akuntansi merupakan salah satu media pengelolaan dan

penyampaian informasi kuantitatif dalam kegiatan perencanaan, pengawasan dan penilaian sumber daya ekonomi yang berperan dalam mewujudkan koperasi sebagai badan usaha yang efektif, efisien dan ekonomis dalam mengelola sumber daya yang dimilikinya. Salah satu wujud nyata kontribusi Ikatan Akuntan Indonesia (IAI) terhadap koperasi melalui Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan (PSAK) No. 27 tentang akuntansi perkoperasian, juga telah diatur dengan Undang- Undang Nomor 25 tahun 1992.

Sesuai dengan Undang-Undang Nomor 25 tahun 1992 telah menjelaskan tentang prinsip-prinsip koperasi antara lain yaitu Pembagian Sisa Hasil Usaha (SHU) dilakukan secara adil sebanding dengan besarnya jasa usaha masing-masing anggota (andil anggota tersebut dalam koperasi). PSAK No.27 mengatur secara menyeluruh praktek akuntansi yang berkaitan dengan koperasi, dimana pada PSAK tersebut telah mengatur dari karakteristik koperasi sampai dengan laporan keuangan koperasi. Laporan keuangan koperasi terdiri dari Neraca, Perhitungan Hasil Usaha (PHU), Laporan Arus Kas, Laporan Posisi Ekonomi Anggota, Catatan atas Laporan Keuangan.

Seiring dengan pesatnya perkembangan usaha-usaha di Indonesia, pada tanggal 23 Oktober 2010 telah terbit dan disahkan oleh Dewan Standar Akuntansi Keuangan tentang Exposure Draft Pernyataan Pencabutan Standar Akuntansi Keuangan yaitu pencabutan Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan (PSAK) No. 27 tentang akuntansi

perkoperasian. Pencabutan PSAK No. 27 dilandasi alasan sebagai dampak konvergensi IFRS yang mengakibatkan SAK berbasis industri harus dicabut karena sudah diatur SAK lain. Dengan diberlakukan PSAK yang berbasis IFRS, maka koperasi akan berat menyusun dan menyajikan laporan keuangannya menggunakan IFRS. Namun, sesuai dengan surat edaran Deputi Kelembagaan Koperasi dan UKM Nomor: 200/SE/Dept.1/XII/2011 tanggal 20 Desember 2011 bahwa sehubungan perbelakuan IFRS, maka entitas Koperasi dalam penyusunan dan penyajian laporan keuangannya mengacu pada Standar Akuntansi Keuangan (SAK) Entitas Tanpa Akuntabilitas Publik (ETAP) dimana penyusunan Laporan keuangan yang lengkap, yaitu: neraca, laporan laba rugi, laporan arus kas, laporan perubahan ekuitas, dan catatan atas laporan keuangan.

Diberlakukannya Standar Akuntansi Keuangan untuk Entitas Tanpa Akuntabilitas Publik (SAK ETAP) sebagai acuan dalam tata cara penyajian laporan keuangan diharapkan koperasi dapat bertindak lebih efisien dengan suatu tingkat keseragaman dari segi perlakuan akuntansinya baik dalam pelaporan keuangan maupun dalam pelaksanaan aktifitasnya dan secara umum dapat mewujudkan koperasi lebih maju dan profesional. Standar Akuntansi Keuangan Entitas Tanpa Akuntabilitas Publik (SAK ETAP) ditetapkan oleh Ikatan Akuntansi Indonesia (IAI) untuk mempermudah perusahaan kecil dan menengah. SAK ETAP ini dimaksudkan agar semua unit usaha menyusun laporan keuangan sesuai

dengan standar yang telah ditetapkan. Standar ETAP ini cukup sederhana dan tidak akan menyulitkan penggunaannya (Tanugraha, 2012).

Seiring dengan dihapuskannya PSAK No. 27 tentang Perkoperasian dan diberlakukannya SAK ETAP diharapkan penerapan standar akuntansi perkoperasian ini dapat memberi gambaran kinerja manajemen di masa lalu serta untuk prospek di masa yang akan datang, sehingga dapat dipercaya dan diandalkan baik oleh pengurus dan anggota koperasi serta pihak eksternal yang memiliki kepentingan terhadap koperasi tersebut. Namun, masih banyak koperasi di Indonesia yang belum menerapkan standart akuntansi berbasis SAK ETAP, oleh sebab itu dilakukannya evaluasi penerapan standar tersebut pada Koperasi “Warga Listrik” (WARLIS) PLN Surabaya Selatan. Koperasi tersebut telah berdiri lama dan diharapkan telah menerapkan SAK ETAP, namun setelah dilakukannya wawancara bagian akuntan tidak mengetahui standart apa yang digunakan oleh Koperasi, dengan memperhatikan latar belakang tersebut diatas, dalam penelitian ini diangkat judul : **“Evaluasi atas Penerapan Standar Akuntansi Keuangan Entitas Tanpa Akuntabilitas Publik (SAK ETAP) Pada Koperasi “Warga Listrik” (WARLIS) PLN Surabaya Selatan”**.

1.2 Penjelasan Judul

Ealuasi adalah kegiatan untuk mengumpulkan informasi tentang bekerjanya sesuatu, yang selanjutnya informasi tersebut digunakan untuk menentukan alternatif yang tepat dalam mengambil keputusan. Fungsi

utama evaluasi dalam hal ini adalah menyediakan informasi-informasi yang berguna bagi pihak decision maker untuk menentukan kebijakan yang akan diambil berdasarkan evaluasi yang telah dilakukan.

Standar Akuntansi Keuangan (SAK) adalah suatu kerangka dalam prosedur pembuatan laporan keuangan agar terjadi keseragaman dalam penyajian laporan keuangan. SAK ETAP adalah Standard akuntansi keuangan untuk Entitas Tanpa Akuntabilitas Publik. ETAP yaitu Entitas yang tidak memiliki akuntabilitas publik yang signifikan serta menerbitkan laporan keuangan untuk tujuan umum bagi pengguna eksternal. ETAP menggunakan acuan IFRS untuk Small Medium Enterprises.

1.3 **Rumusan Masalah**

Berdasarkan uraian latar belakang diatas, maka dapat dirumuskan masalah yang akan dilakukan peneliti adalah:

1. Apakah Koperasi “Warga Listrik” (WARLIS) PLN Surabaya Selatan” telah menerapkan SAK ETAP?
2. “Bagaimana penerapan SAK ETAP dalam pencatatan dan penyajian laporan keuangan pada Koperasi “Warga Listrik” (WARLIS) PLN Surabaya Selatan”.

1.4 **Tujuan Penelitian**

Tujuan dari penelitian ini adalah:

1. Untuk mengetahui standar apa yang digunakan oleh Koperasi “Warga Listrik” (WARLIS) PLN Surabaya Selatan”.

2. Untuk mengetahui seberapa jauh penerapan SAK ETAP dalam pencatatan dan penyajian laporan keuangan pada Koperasi Warga Listrik (WARLIS) PLN Surabaya Selatan.

1.5 Manfaat Penelitian

1. Koperasi Warga Listrik (WARLIS) PLN Surabaya Selatan

Memberikan sumbangan informasi serta data yang kongkrit untuk mengetahui penerapan SAK ETAP terhadap pelaporan keuangan PT Koperasi Warga Listrik (WARLIS) PLN Surabaya Selatan, yang mungkin nantinya bisa menjadi bahan pengambil kebijakan di lingkup perusahaan.

2. STIE Perbanas Surabaya

Sebagai referensi untuk subjek SAK ETAP pada Koperasi, dan melihat penerapan SAK ETAP terhadap pelaporan keuangan koperasi.

3. Bagi Penulis Selanjutnya

Sebagai tambahan pengetahuan terutama lingkungan Perguruan Tinggi sebagai bahan bacaan untuk memperluas terapan dari pengetahuan yang dipelajari di bangku kuliah, khususnya dalam pendalaman materi mengenai laporan keuangan koperasi berdasarkan SAK ETAP.

1.6 Metode Penelitian

1.6.1 Sumber dan Jenis Data

Dalam penyusunan laporan tugas akhir ini diperlukan data-data sebagai berikut :

Jenis data yang digunakan adalah data sekunder yaitu data yang telah diolah, berupa data keuangan perusahaan yang meliputi Neraca, Perhitungan Sisa Hasil Usaha, Laporan Arus Kas, Laporan Promosi Ekonomi Anggota, Catatan Atas Laporan Keuangan. Data diperoleh dari Koperasi Warga Listrik (WARLIS) PLN Surabaya Selatan. Dan data primer yaitu wawancara pada Koperasi Warga Listrik (WARLIS) PLN Surabaya Selatan mengenai perubahan laporan keuangan koperasi berdasarkan SAK ETAP.

1.6.2 Pengumpulan Data

Metode pengumpulan data adalah suatu metode dalam usaha mengumpulkan data-data yang diperlukan dalam proses pelaksanaan penelitian. Dalam penelitian ini menggunakan teknik dokumentasi dan wawancara. Teknik Dokumentasi yaitu suatu teknik pengumpulan data dimana berupa data-data dari laporan keuangan yang berhubungan dengan obyek yang diteliti. Teknik Wawancara yaitu pengumpulan data dengan cara menanyakan langsung kepada staf ahli keuangan mengenai penerapan SAK ETAP terhadap laporan keuangan koperasi.

1.6.3 Ruang Lingkup Penelitian

Dalam penelitian ini terdapat ruang lingkup agar dalam pembahasan lebih terfokus, yaitu:

1. Penelitian ini berfokus pada Koperasi Warga Listrik (WARLIS) PLN Surabaya Selatan.
2. Data analisis menggunakan laporan keuangan yang terdiri atas Neraca, Perhitungan Sisa Hasil Usaha, Perubahan Ekuitas Laporan Arus Kas, dan Catatan Atas Laporan Keuangan.



